

INDIKATOR KINERJA UTAMA

(I K U)

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2016-2021

NAMA OPD	: KECAMATAN KESESI
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSNAKAN	: Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.
TUGAS POKOK	: Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
FUNGSI	: <ol style="list-style-type: none">Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;Mengordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umumMengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;Mengoordinasikan penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya;Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, desa dan/atau kelurahan;Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di kecamatan;Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom, meliputi aspek: perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1	2	3
<p>Tujuan : Meningkatkan Kapasitas Pemerintah Kabupaten Pekalongan mencakup sistem kelembagaan ASN di tingkat Kecamatan</p> <p>Sasaran: Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang mapan dan berkelanjutan,serta pelayanan publik sesuai dengan prinsip prinsip Good Governance di tingkat kecamatan</p>	<p>Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Tingkat Kecamatan</p>	<p>- Alasan Pemilihan Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai dengan tupoksi kecamatan sebagai OPD yang melaksanakan kegiatan pelayanan masyarakat dan tugas pelimpahan kewenangan Bupati. • Untuk mengetahui kinerja dan perkembangan pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat, perlu dilakukan penilaian atas pendapat masyarakat terhadap pelayanan, melalui penyusunan IKM secara periodic; • Sebagai tolak ukur dan gambaran bagi masyarakat, untuk menilai tingkat kualitas pelayanan, serta bahan bagi instansi untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan public selanjutnya. <p>- Formulasi Pengukuran Total dari Nilai persepsi per unsur dikali Nilai Total penimbang dibagi total unsur yang terisi.</p> <p><u>Persepsi per unsur pelayanan :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. persyaratan pelayanan 2. prosedur pelayanan 3. Waktu penyelesaian pelayanan 4. Biaya pelayanan 5. Hasil pelayanan 6. Kemampuan petugas 7. Sikap petugas 8. Maklumat pelayanan 9. Sarana pengaduan <p>- Tipe Penghitungan Non Komulatif</p> <p>- Sumber Data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Survey Kepuasan Masyarakat, yang meliputi hasil responden - Buku Layanan administrasi publik

Kesesi, 7 Januari 2020



AJID SURYO PRATONDO, S.STP

Pembina Tk.I

NIP.19761210 199703 1 005